

MENANGKAL DAMPAK BURUK DISRUPSI KEMBAR

PENURUNAN BUNGA ACUAN & TANTANGAN YANG DIHADAPI BI

Deputi Gubernur BI, Dody Budi Waluyo dalam webinar itu mengatakan bahwa setelah perekonomian masuk dalam fase kenormalan baru (new normal), bank sentral akan tetap berperan agar dunia usaha bisa kembali bergerak, konsumsi bisa kembali meningkat, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi bisa kembali ditingkatkan. “Ujung sebenarnya adalah penciptaan lapangan kerja,” kata Dody dalam webinar LPPI itu.

Bahkan dia mengungkapkan bahwa jika yang dibutuhkan dalam proses pemulihan itu adalah penurunan suku bunga. “Seandainya room terbuka untuk melakukan penurunan suku bunga, kami akan lakukan itu,” ujar Dody dalam webinar LPPI itu.

Meski Menurut Dody dari data-data yang dimiliki bank sentral bahwa industri manufaktur sudah mulai bergerak meski masih lambat. Mulai Bergeraknya industri yang terpampang dalam Purchasing Manager Index (PMI) yang disebabkan karena Cina sudah mulai membuka ekonominya.

Di samping itu, angka Purchasing Manager's Index (PMI) kata Dody relatif terjadi perlambatan yang tertahan. Hal ini menandakan ada beberapa kegiatan manufaktur yang sudah mulai bergerak. "Data-data ini menunjukkan kita tidak akan menuju ke titik resesi seperti perkiraan banyak orang meskipun di triwulan kedua diperkirakan pertumbuhan ekonomi bisa melemah," katanya.

Dody menuturkan, kinerja ekspor sudah mulai terlihat pada beberapa komoditas, terutama emas dan baja. Selanjutnya adalah nikel karena yang sebagian besar diekspor ke China, akan memberikan dorongan dari sisi ekspor. BI, lanjut dia akan selalu bersinergi dengan otoritas lain untuk tetap menangkali dampak Covid-19 terhadap perekonomian. setelah melakukan pelonggaran yang sangat masif sejak pandemi melanda ekonomi, BI kembali menegaskan tetap membuka peluang untuk menurunkan suku bunga acuan. “BI melonggarkan likuiditas secara maksimal, meski suku bunga belum diturunkan. Tetapi Suku bunga acuan BI terbuka room untuk turun lagi,” kata Dody di webinar LPPI itu. Dalam webinar yang berlangsung selama lebih dari 2 jam tersebut, Dody mengatakan ada empat tantangan yang dihadapi BI dalam melakukan pencegahan dampak lanjut dari Covid-19 ini. Pertama, meski penurunan bunga acuan terus berlanjut tetapi pembiayaan tetap melemah. Kredit, hingga Mei, kata dia hanya tumbuh 3,04 persen, lebih rendah dari pertumbuhan dana pihak ketiga yang mencapai 8,8 persen.

Kedua, adalah tantangan dalam menstabilkan nilai tukar rupiah. Saat ini di masyarakat muncul isu mengenai second wave pandemic, dan juga masalah anggaran di pemerintah dan DPR yang membuat kebijakan BI tidak optimal. Ketiga, kondisi likuiditas di sektor perbankan yang tidak merata dan keempat tantangan soal kewajiban BI terkait pembelian surat utang pemerintah di pasar perdana. “BI akan beli.

*Jakarta (3 Juli 2020)
Lembaga Pengembangan Perbankan
Indonesia (LPPI) kembali
menyelenggarakan webinar yang
dibutuhkan masyarakat khususnya di
sektor keuangan. Penyelenggaraan kali
ini sekaligus untuk memperingati ulang
tahun Bank Indonesia yang jatuh pada
tanggal 1 Juli lalu. Tema yang diangkat
kali ini adalah mengenai Mengelola
Disrupsi Kembar : Disrupsi Teknologi
dan Disrupsi Perubahan Iklim.*



Tapi tetap memperhatikan prinsip yaitu dampaknya kepada inflasi, dan memperhatikan keseimbangan pasar,” kata Dody.

KEBIJAKAN PERUBAHAN IKLIM

Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal, Adi Budiarmo yang juga hadir dalam webinar LPPI itu juga mengatakan bahwa wabah Covid-19 mirip dengan risiko perubahan iklim. “Wabah ini membutuhkan global action karena ini termasuk severe crisis. Di global juga sudah muncul ancaman second wave dari pandemi Covid-19 ini,” kata dia.

Pandemi Covid-19, lanjut Adi, memberikan efek domino pada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan. Penyebaran Covid-19 yang mudah, cepat, dan luas menciptakan krisis kesehatan dengan belum ditemukannya vaksin, obat, serta keterbatasan alat dan tenaga medis. Pemerintah telah merespons kondisi itu dengan mengeluarkan kebijakan untuk menekan penyebarannya sejak awal wabah itu muncul. “Langkah untuk flattening the curve memiliki konsekuensi pada berhentinya aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja di berbagai sektor, tak terkecuali sektor-sektor informal,” kata dia di webinar LPPI itu.

Kebijakan itu lantas membuat kinerja ekonomi menurun tajam, konsumsi terganggu, investasi terhambat, ekspor-impor berkontraksi. Pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan melambat bahkan menurun tajam.

Di sektor keuangan kemudian muncul volatilitas seiring turunnya kepercayaan investor asing dan terjadinya flight to quality. Sektor keuangan juga terdampak karena penurunan kinerja sektor riil; NPL, profitabilitas dan solvabilitas perusahaan mengalami tekanan.

Kementerian Keuangan, sudah menyiapkan langkah demi mendukung kebijakan pemerintah menangkul dampak Covid-19 pada perekonomian dengan meningkatkan belanja pemerintah. dalam Peraturan Pemerintah No 72/2020 pemerintah menambah belanja sekitar Rp125 triliun dari yang telah dialokasikan dalam Perpres 54/2020. Tambahan itu akan digunakan untuk subsidi UMKM dan IJP UMKM, perpanjangan Bansos Tunai dan Diskon Listrik, tambahan DID dalam rangka PEN, dan Belanja penanganan Covid-19 lainnya. Dikatakan Adi, bahwa tanpa adanya wabah ini Indonesia memang sudah termasuk dalam negara yang rentan terhadap risiko perubahan iklim. Kerentanan sebagian besar wilayah di Indonesia yang tergolong tinggi tersebut diiringi dengan fakta bahwa emisi gas karbon dioksida per kapita di Indonesia sampai dengan tahun 2016 terus mengalami tren peningkatan.

Meski begitu, pemerintah tidak tinggal diam dan berencana mengurangi kerentanan itu. Kata Adi, pemerintah berkomitmen untuk mengendalikan perubahan iklim melalui berbagai ratifikasi kebijakan internasional ke dalam peraturan perundang-undangan serta rencana aksi nasional. “Pada 2016, Indonesia turut sepakati Paris Agreement melalui penyampaian Nationally Determined Contribution (NDC) kepada UNFCCC untuk mengurangi emisi GRK sebesar 29% di bawah business as usual pada tahun 2030 melalui usaha sendiri, serta penurunan emisi 41% di bawah BaU melalui dukungan internasional,” jelas Adi, di webinar LPPI itu.

File ini dapat diunduh melalui : <http://lppi.or.id/produk/riset/>

Untuk korespondensi dan informasi lebih lanjut, hubungi :

Divisi Corporate Secretary

Telp: (021) 71790919 | Email: dcsc@lppi.or.id

Website : www.lppi.or.id

Disclaimer: Tidak ada satu bagian pun dalam publikasi ini yang ditujukan sebagai promosi, penawaran, rekomendasi, nasihat investasi, atau untuk membentuk dasar keputusan-keputusan strategis atas suatu kegiatan, produk, dan/atau jasa dari pihak manapun. Oleh karena itu, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap keputusan pihak manapun.

